



# **Bulletin** **Bappebti**

Mengabdikan Dengan Integritas

**Instrumen Penguatan  
Ekonomi Daerah**

**Serah Fisik Emas  
'Made in JFX'**

**Komoditi Teh Masuk  
Bursa Berjangka**

**Derap Langkah &  
Kinerja Industri PBK**





# DAFTAR ISI

## Berita Utama.....4-7

- Derap Langkah & Kinerja Industri PBK
- Instrumen Penguatan Ekonomi Daerah

## Resi Gudang.....8-11

- Pokja SRG, Pemetaan dan Meretas Potensi Komoditi Kakao
- Implementasi SRG Aceh Besar, Mengangkat Potensi Komoditi Pangan

## Berjangka.....12-13

- Bursa dan Kliring, Harus Miliki Strategi Penambahan Modal
- Serah Fisik Emas 'Made in JFX'

## Agenda Foto.....14-15

## Aktualita.....16-17

- Bank Standard Chartered Mundur dari Industri PBK
- Bappebti Bekukan Izin EQB dan Izin JTB Dicairkan
- Komoditi Teh Masuk Bursa Berjangka
- 9 Permendag Baru Diterbitkan

## Analisa.....18

## Breaking News.....19

## Info.....20

## Info SRG.....21

## KomiKita...22-24

### Syarat Komoditi SRG



## Kolom...24-25

### Realisir Potensi Perdagangan Berjangka



## Kiprah...26-27

### 'Turun Gunung' Benahi PBK



## Tips 7P

- 1). Pelajari latar belakang perusahaan yang menawarkan transaksi pada anda;
- 2). Pelajari tata cara bertransaksi dan penyelesaian perselisihan;
- 3). Pelajari kontrak berjangka komoditi yang akan diperdagangkan;
- 4). Pelajari wakil pialang yang telah mendapatkan izin dari Bappebti;
- 5). Pelajari isi dokumen perjanjiannya;
- 6). Pelajari risiko-risiko yang dihadapi.
- 7). Pantang percaya dengan janji-janji keuntungan tinggi.

KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF TRADE



#### Penerbit

Badan Pengawas Perdagangan  
Berjangka Komoditi

**Penanggung Jawab**  
Sutrisno Edi

**Pemimpin Redaksi**  
Marthin Simanungkalit

**Wakil Pemimpin Redaksi**  
Taufik K.S.

#### Dewan Redaksi

Subagiyo  
Agus Muharani  
Himawan Purwadi  
Widiastuti  
Natalius Nainggolan  
Annisa F. Wulandari  
Poppy Julianti  
Vera Hendrias  
Tomi Setiawan  
Apriliyanto

#### Sirkulasi

Katimin  
Gita Regina

#### Alamat Redaksi

Gedung Bappebti  
Jl. Kramat Raya  
No. 172, Jakarta Pusat.

**www.bappebti.go.id**

Redaksi menerima artikel ataupun opini  
dikirim lengkap dengan identitas serta foto  
ke E-mail:  
buletin@bappebti.go.id



Foto : Kepala Bappebti, Sutrisno Edi, didampingi jajaran Eselon II Bappebti mengamati aplikasi sistem perdagangan berjangka yang tersedia di Gedung Bappebti.

Menteri Perdagangan, Thomas T. Lembong, pada sebuah kesempatan baru-baru ini mengatakan, dalam tiga tahun terakhir ekspor komoditi Indonesia yang menjadi bahan baku di berbagai negara tujuan nilai dan volumenya cenderung menurun. Salah satu faktor penyebabnya dikarenakan daya saing yang semakin ketat. Di samping itu, melemahnya ekonomi dunia yang mengakibatkan rendahnya daya beli sehingga harga komoditi cenderung turun.

Sebab itu, Menteri Perdagangan mendorong para pelaku usaha untuk mengolah komoditi mentah menjadi barang setengah jadi. Sehingga ketika diekspor nilainya menjadi lebih tinggi.

Pernyataan Menteri Perdagangan Thomas T. Lembong, tersebut, agaknya memiliki relevansi dengan fakta yang terjadi di bursa berjangka komoditi tanah air. Seperti dalam paparan Kepala Bappebti, kepada media tentang pencapaian industri perdagangan berjangka komoditi pada 9 September lalu, dikatakan, transaksi kontrak multilateral di bursa berjangka pada periode Januari-Juli 2015 mengalami peningkatan signifikan sebesar 11,17 % dibandingkan periode yang sama pada tahun 2014.

Pada tahun 2014, transaksi multilateral mencapai Rp 10,39 triliun dengan volume transaksi sebesar 645.825 lot. Dan di tahun 2015, nilai transaksi meningkat menjadi Rp 11,55 triliun dengan volume transaksi sebesar 674.036 lot.

Lebih spesifik lagi, kontrak berjangka multilateral yang mengalami peningkatan signifikan sepanjang periode Januari-Juli 2015

di bursa berjangka *Jakarta Futures Exchange-JFX* adalah kontrak berjangka komoditi kopi. Data JFX menunjukkan, peningkatan kontrak berjangka kopi robusta pada bulan Agustus 2015 sebanyak 104,97 % menjadi 23.022 lot, dibandingkan dengan periode Juli sebesar 11.320 lot.

Menurut Kepala Bappebti, Sutrisno Edi, lonjakan transaksi kontrak berjangka multilateral di bursa berjangka itu, disebabkan adanya kebutuhan para pelaku pasar terhadap instrumen lindung nilai. "Itu artinya, para pelaku pasar melakukan lindung nilai terhadap komoditinya dari ketidakpastian harga," katanya.

Sebab itu, Sutrisno Edi, juga mendorong bursa berjangka untuk meningkatkan transaksi fisik dan berjangka untuk komoditi unggulan ekspor Indonesia seperti *crude palm oil*- CPO, olein, kopi, kakao dan timah.

Di sisi lain, bursa berjangka juga diminta untuk segera mengkaji kontrak berjangka baru seperti komoditi karet, teh, pala dan rumput laut. Hal itu dikatakan untuk meningkatkan utilitas bursa berjangka dan menciptakan sarana perdagangan yang efektif bagi pelaku usaha.

Hal penting lainnya yang disampaikan Sutrisno Edi adalah, sosialisasi dan edukasi baik kepada pelaku usaha maupun masyarakat terkait subjek kontrak berjangka multilateral dan manfaat mekanisme perdagangan berjangka komoditi bagi perekonomian nasional.

Tabik!



## Derap Langkah & Kinerja Industri

Memasuki bulan September 2015 atau kuartal ketiga, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi- Bappebti merilis beberapa aspek pencapaian di bidang perdagangan berjangka komoditi- PBK. Aspek apa saja yang sudah dicapai? Berikut ini penjabaran Kepala Bappebti, Sutriyono Edi, kepada sejumlah jurnalis pada 9 September 2015, di Gedung Bappebti, Jakarta;

Pertama, sebagaimana amanat Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, pada awal tahun 2015, Bappebti menetapkan tiga arah kebijakan di bidang PBK, yaitu

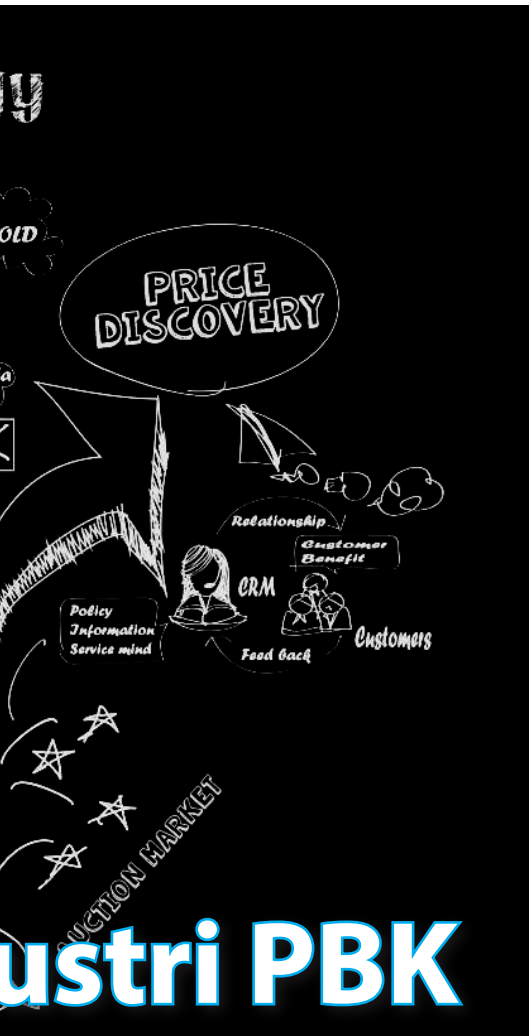
(1) peningkatan transaksi multilateral; (2) peningkatan integritas industri PBK; dan (3) peningkatan iklim usaha. Ketiga hal ini mendukung upaya menjadikan komoditi-komoditi ekspor utama Indonesia yang diperdagangkan di bursa berjangka agar dapat menjadi referensi harga internasional dengan tetap menjaga prinsip dan memperhatikan aspek perlindungan hukum kepada masyarakat. "Pada akhir kuartal ke-3, Bappebti diharapkan telah memperoleh berbagai pencapaian searah dengan kebijakan yang ditetapkan di awal tahun," kata Sutriyono Edi.

Dalam rangka peningkatan transaksi kontrak multilateral di bursa berjangka, Bappebti melakukan berbagai upaya

seperti peningkatan kompetensi sumber daya manusia- SDM pelaku usaha di bidang PBK dengan menyelenggarakan 5 (lima) kali pelatihan teknis *commodity desk*, optimalisasi peran *commodity desk*, menyiapkan sarana promosi komoditi multilateral, moratorium perijinan Sistem Perdagangan Alternatif- SPA, mendorong bursa menyediakan sistem transaksi yang semakin handal, serta menyiapkan integrasi Sistem Resi Gudang- SRG dengan PBK.

Selain itu, tambah Sutriyono Edi, Bappebti juga mendorong bursa meningkatkan transaksi fisik dan berjangka untuk komoditi unggulan ekspor Indonesia seperti *crude palm oil*- CPO, Olein, kopi, kakao, timah serta





mengkaji kontrak baru seperti karet, teh, pala dan rumput laut.

Tidak kalah pentingnya, dalam upaya melakukan sosialisasi, edukasi dan promosi kontrak multilateral melalui media cetak dan elektronik termasuk juga pelaksanaan seminar yang antara lain berupa “*International Tin Conference*” yang akan diselenggarakan pada tanggal 14-15 September 2015 di Jakarta dengan peserta pembeli dan penjual timah dari berbagai negara.

Peningkatan transaksi kontrak multilateral di bursa sudah tampak terlihat dari nilai transaksi bulan Januari – Juli 2014 sebesar Rp 10,39 triliun menjadi Rp 11,55 triliun pada bulan Januari-Juli 2015. Atau mengalami peningkatan sebesar 11,17 %.

Sementara itu, volume transaksi multilateral juga meningkat dari Januari-Juli 2014 sebesar 645.825 lot menjadi 674.036 lot pada bulan Januari-Juli 2015 atau sebesar 4,37 %.

Salah satu bentuk nyata komitmen peningkatan transaksi multilateral adalah adanya peningkatan kontrak berjangka kopi robusta di Jakarta Futures Exchange- JFX pada bulan Agustus 2015 sebanyak 104,97 % menjadi 23.022 lot, dibandingkan dengan periode Juli sebesar 11.320 lot.

“Lonjakan transaksi ini didukung oleh pelaku pasar yang melakukan lindung nilai menjelang puncak panen raya kopi,” terang Sutriyono Edi.

Sementara itu, untuk komoditi CPO, harga yang terjadi di Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia- BKDI sudah dipakai menjadi harga referensi oleh dunia usaha, maupun dalam penentuan Harga Patokan Ekspor- HPE sebagai harga acuan pemerintah. Penetapan HPE CPO mulai 1 Juli 2013 sudah mengacu pada bursa dalam negeri, dengan komposisi 60 % bursa di Indonesia, 20 % bursa Kuala Lumpur dan 20 % Rotterdam.

Kedua, untuk meningkatkan integritas industri PBK, Bappebti melakukan langkah-langkah yang dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap industri PBK, antara lain melalui penandatanganan Pakta Integritas oleh direktur utama bursa berjangka, lembaga kliring berjangka, pialang berjangka, dan pedagang penyelenggara SPA.


Selain itu, Bappebti menerbitkan paket kebijakan Maret 2015 di bidang PBK yang bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan terhadap industri PBK melalui pengaturan yang tegas. Paket kebijakan tersebut berupa 5 (lima) buah Peraturan Kepala Bappebti yang saling terkait, yang mencakup pengamanan dana nasabah melalui penempatan margin di lembaga kliring sebesar 70 %, pelarangan peminjaman modal oleh pemegang saham atau pihak terafiliasi, peningkatan dana jaminan bagi pedagang, pengaturan dana kompensasi,

kewajiban pelaporan keuangan dan modal bersih disetorkan.

“Dalam kaitan itu, untuk memantau kepatuhan pialang berjangka memenuhi kewajiban pelaporan keuangan, Bappebti telah membangun sistem pengawasan melalui *e-reporting* yang terhubung secara langsung dan *realtime* dengan sistem pelaporan keuangan pialang berjangka dan perbankan,” kata Sutriyono Edi.

Di samping itu, tambahnya, Bappebti meningkatkan pengawasan melalui sistem pengawasan yang terintegrasi dengan sistem pengawasan SPA, sehingga seluruh transaksi SPA yang dilaporkan ke JFX maupun ke BKDI dapat terpantau dengan menggunakan satu sistem pengawasan. Hal ini dilakukan dalam rangka pengawasan transaksi SPA yang lebih efisien dan efektif.

Ketiga, untuk meningkatkan iklim usaha, pada tahun 2015 Bappebti memberikan kemudahan pelayanan perizinan secara *online* untuk 10 perizinan di bidang PBK. Selain itu, Undang-Undang juga memberikan kesempatan kepada selain pendiri dan anggota bursa untuk dapat menjadi pemegang saham bursa- demutualisasi.

Bappebti juga akan memberdayakan Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia- Aspebtindo yang telah terbentuk pada bulan Juni 2015. Aspebtindo dapat mendukung terbentuknya industri PBK yang berdaya saing, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat di bidang PBK, serta berperan dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN. “Beberapa program Aspebtindo yang dapat mendukung percepatan industri di antaranya penyusunan dan penegakan kode etik, peningkatan kualitas SDM yang terlibat dalam sektor PBK melalui sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, peningkatan profesionalisme, serta kompetensi,” pungkas Sutriyono Edi. 



## Instrumen Penguatan Ekonomi Daerah

***Sistem Resi Gudang- SRG dan Pasar Lelang Komoditi- PLK merupakan instrumen perdagangan modern yang menjadi salah satu andalan Kementerian Perdagangan dalam menumbuhkan dan menguatkan ekonomi daerah.***

**P**eran strategis Bappebti lainnya adalah melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan Sistem Resi Gudang sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Total gudang baik yang dibangun pemerintah maupun milik swasta yang telah mendapat persetujuan sebagai gudang SRG terdapat sebanyak 107 unit, di mana 73 di antaranya telah menerbitkan Resi Gudang yang tersebar di 13 provinsi meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Selatan, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa

Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan.

Untuk meningkatkan pemanfaatan SRG oleh masyarakat, Bappebti tidak hanya mendorong pelaksanaan SRG untuk komoditas yang mendukung ketahanan pangan seperti komoditas Gabah, Beras dan Jagung, tetapi juga untuk komoditas industri seperti Rotan dan Rumput Laut. Pemanfaatan SRG untuk komoditas Rotan dilakukan dengan *pilot project* di sentra hulu, yaitu Katingan dan Palu sebagai lokasi produksi utama rotan dan untuk sentra hilir di daerah Cirebon sebagai sentra industri Rotan.

Sedangkan untuk mendorong pelaksanaan SRG Rumput Laut, Bappebti telah memberikan persetujuan kepada gudang milik Kospermindo, PT Rika Rayhan Mandiri dan gudang Koperasi

Agro Niaga sebagai gudang SRG. Diharapkan melalui gudang-gudang ini maka SRG dapat dimanfaatkan secara optimal tidak hanya oleh kalangan industri tetapi juga para petani Rumput Laut.

"Strategi yang dilakukan Bappebti dalam rangka pengembangan pelaksanaan dan pemanfaatan SRG, di antaranya adalah penerapan model bisnis SRG integratif yang menyinergikan peluang usaha di sektor hulu (masa tanam hingga masuknya komoditas ke gudang) dengan sektor hilir (pengolahan, pembiayaan dan pemasaran) melalui pemanfaatan Pasar Lelang Komoditas," tegas Kepala Bappebti, Sutriyono Edi, dalam penjelasannya tentang pencapaian di SRG dan PLK di kuartal ketiga tahun 2015, kepada sejumlah jurnalis di Gedung



Bappebti, pada 9 September 2015, lalu di Jakarta.

Dengan demikian, tambahnya, maka usaha atau layanan yang diberikan melalui SRG tidak hanya penyimpanan barang, melainkan juga pengadaan saprodi, angkutan, pengeringan gabah, penggilingan padi, penyimpanan, pembiayaan, pemasaran, dan pengiriman komoditas.

"Selain itu, Bappebti juga menerapkan strategi jalur ganda yang mengintegrasikan upaya peningkatan daya saing komoditas pangan dengan peningkatan nilai tambah dan daya saing ekspor," ujar Sutriyono Edi.

"Salah satu wujud dari strategi ini adalah pemberian persetujuan Gudang SRG untuk gudang milik PT Food Station Tjipinang Jaya di Pasar Induk Beras Cipinang dalam rangka mengintegrasikan pelaksanaan SRG dari wilayah sentra produksi (gabah) ke wilayah pemasaran beras."

Dalam rangka meningkatkan integritas SRG, Bappebti telah menyusun rancangan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang, di mana saat ini telah disampaikan ke Sekretariat Negara untuk mendapatkan tanda tangan dari Presiden. Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang yang kredibel dan handal berfungsi sebagai penjamin terhadap terjadinya kegagalan pengelolaan barang oleh Pengelola Gudang. Melalui Peraturan Pemerintah, diharapkan kepercayaan pelaku usaha dan perbankan terhadap integritas SRG semakin meningkat.

Pada bulan Mei 2015 juga telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Bappebti, Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat, PT Pos Indonesia, dan Disperindag Prov. Jawa Barat, untuk percepatan implementasi SRG di Propinsi Jawa Barat dengan *pilot project* di Kab. Ciamis dan Kab. Tasikmalaya.

Guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai SRG, pada

tahun 2015 Bappebti melaksanakan sosialisasi SRG dan bimbingan teknis pelaksanaan SRG masing-masing di 10 daerah. Sedangkan untuk menyiapkan koperasi, BUMD maupun tenaga SDM pengelola gudang lainnya di daerah, telah dilaksanakan pelatihan teknis SRG bagi pelaku usaha, pelatihan pengujian mutu barang dalam SRG, dan program pendampingan calon Pengelola Gudang SRG.

"Dalam rangka diseminasi harga, Bappebti juga memiliki layanan informasi harga komoditi untuk gabah, beras, jagung, rumput laut, kopi dan kakao yang tersebar di beberapa daerah meliputi Jakarta, Indramayu, Subang, Lebak, Purwodadi, Cianjur, Lampung, Probolinggo, Tasikmalaya, Grobogan, Makassar dan Sumbawa," jelas Sutriyono Edi.

Informasi harga yang dimaksud yakni dapat diakses melalui situs <http://infoharga.bappebti.go.id> dan ponsel 0812 1867 8000.

"Manfaat dari layanan informasi itu, bagi petani dapat mengetahui perkembangan harga komoditi, sedangkan bagi pelaku usaha lainnya dapat dijadikan acuan harga guna pengambilan keputusan bisnis," katanya.

Sampai dengan 31 Agustus 2015, jumlah Resi Gudang yang telah diterbitkan sebanyak 2.021 resi dengan total volume komoditi sebanyak 77.511,84 ton (66.453,56 ton gabah, 5.485,22 ton beras, 5.075,27 ton jagung, 77,79 ton kopi, dan 420 ton rumput laut) atau total senilai Rp 399,29 miliar. Sedangkan nilai pembiayaan yang telah diberikan lembaga keuangan telah mencapai sebesar Rp 247,20 miliar.

## Pasar Lelang

Dalam bidang pasar lelang, beberapa hal yang telah dilakukan Bappebti dalam rangka pengembangan pelaksanaan dan pemanfaatan PLK di antaranya adalah melalui Revitalisasi Kelembagaan Penyelenggara Pasar Lelang. Saat ini telah dilakukan revitalisasi

PLK di 5 provinsi penyelenggara pasar lelang komoditas yaitu Jawa Tengah, Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.

Hal ini dilakukan guna menciptakan kemandirian dan profesionalisme dalam penyelenggaraan PLK. Selain itu, untuk meningkatkan kinerja Pasar Lelang Komoditas, Bappebti sedang melakukan pembangunan Aplikasi Pasar Lelang Komoditas Terpadu. Aplikasi ini dapat mengintegrasikan data anggota, menyebarluaskan informasi pasar dari seluruh penyelenggara Pasar Lelang Komoditas, dan memungkinkan transaksi dilakukan secara *online*. Melalui integrasi sistem tersebut, Pasar Lelang Komoditas diharapkan dapat membantu pemasaran seluruh komoditas yang disimpan di Gudang SRG. Dengan dukungan sistem informasi pasar lelang yang handal dan terintegrasinya Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, ke depannya pasar lelang dapat menjadi sebagai salah satu sarana efisiensi mata rantai perdagangan dan pengendalian inflasi seperti yang diharapkan oleh Presiden Jokowi.

Sebagai tindak lanjut atas amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan untuk mendukung pengembangan pelaksanaan dan pemanfaatan PLK, saat ini sedang disusun rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas.

Sampai dengan 31 Agustus 2015, nilai transaksi PLK telah mencapai Rp 159,84 miliar dengan total komoditas yang ditransaksikan berjumlah 95 jenis dengan transaksi 10 komoditas terbesar adalah Jagung dengan *market share* sebesar 19,4 % diikuti oleh Beras (17,0 %), Lada (9,2 %), Bawang Merah (7,1 %), Jahe (6,4 %), Jeruk (5,4 %), Gambir Hitam (4,0 %), Kopi (3,7 %), Kayu Manis (3,1 %) dan Kentang (2,4 %). 📊





## Pokja SRG Pemetaan dan Meretas Potensi Komoditi Kakao

***Implementasi Sistem Resi Gudang- SRG untuk komoditi kakao terus didorong. Diharapkan penerapannya dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan petani kakao.***

Masuknya kakao sebagai komoditi SRG sudah terhitung cukup lama. Persisnya kakao telah menjadi salah satu komoditi SRG sejak awal skema SRG lahir di Indonesia. Hal itu termaktub dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007, yang kini telah mengalami perubahan menjadi Permendag Nomor 08/M-DAG/PER/02/2013 tentang Barang yang dapat disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang.

Dipilihnya kakao sebagai komoditas SRG bukanlah tanpa dasar. Kakao merupakan salah satu komoditas

andalan perkebunan yang peranannya cukup penting bagi perekonomian nasional. Khususnya sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan dan devisa negara. Di samping itu kakao juga berperan dalam mendorong pengembangan agroindustri.

Berdasarkan data terbaru Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, pada tahun 2015 status perusahaan perkebunan Kakao di Indonesia mayoritas dilakukan di perkebunan rakyat yakni seluas 1.622.600 ha atau sekitar 95 %, kemudian perkebunan swasta 43.225 ha (3 %) dan perkebunan negara 39.127 ha (2 %).

Penerapan SRG untuk komoditas kakao merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan petani kakao. Selain itu, SRG juga dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk meningkatkan skala bisnis yang dijalankan. Melalui mekanisme tunda jual dan pembiayaan, pelaksanaan SRG dapat meningkatkan daya tawar petani dan memperkuat *cash-flow* bagi pelaku usaha seperti koperasi, UKM maupun pabrik atau eksportir.

Tidak hanya itu, pelaksanaan SRG juga berkaitan dengan Pasar Lelang atau Pasar Fisik sebagai sarana distribusi dan pemasaran produk. Keterkaitan keduanya akan dapat secara signifikan memberikan manfaat optimal pada pelaku usaha kakao.

Meski demikian, sayangnya hingga saat ini skema SRG untuk kakao belum berhasil diterapkan. Karena itu, kakao menjadi salah satu fokus utama pembahasan dari Tim Kelompok Kerja-Pokja SRG. Sebagai informasi, Tim Pokja SRG dibentuk untuk memudahkan koordinasi dan kerjasama yang sinergis dan efektif antara kementerian dan lembaga terkait dalam mempercepat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang SRG di Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2011.

Terkait itu, pada Selasa, 22 September 2015, lalu, di Gedung Bappebti, Tim Kelompok Kerja-Pokja SRG melakukan pertemuan membahas "Penyiapan Implementasi Sistem Resi Gudang untuk Komoditas Kakao". Pertemuan itu dipimpin Kepala Bappebti, Sutriyono Edi yang didampingi oleh Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa, Retno Rukmawati. Acara juga dihadiri Perwakilan dari Ditjenbun Kementan, Ditjen Daglu Kemendag, Dit. PMB Kemendag, Deputy Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kemenkop dan UKM, Bank Indonesia, PT. BGR, PT.Sucofindo, ASKINDO, AIKI, dan Jakarta Futures Exchange- JFX.

Dalam pertemuan tersebut, Sutriyono





Edi menuturkan, beragamnya produk turunan kakao dapat membuka peluang pemanfaatan SRG untuk kakao oleh Industri atau pabrikan dan eksportir. Dengan demikian, maka pengembangan Kakao Indonesia tidak hanya terbatas pada sarana penyimpanan, tunda jual dan pembiayaan, tetapi juga pada sisi pemasaran.

"Pada sisi ini, keterkaitan pemanfaatan SRG dengan Pasar Lelang ataupun Pasar Fisik di Bursa Berjangka perlu didorong dan dikembangkan," ujarnya.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan SRG guna meningkatkan kesejahteraan petani kakao serta mendukung industri kakao Indonesia, Bappebti telah melakukan pembangunan gudang sesuai dengan standar SNI 7331:2007 tentang Gudang Komoditas Pertanian, yaitu di Kabupaten Kolaka, Kab. Konawe Selatan, Kab. Luwu Timur, Kota Palu dan Kab. Polewali. "Masing-masing dengan luas sekitar 750 m2 dan kapasitas sebesar 1500 ton," ujar Sutriyono.

Meski gudangnya sudah tersedia, dia mengakui, skema SRG untuk kakao memang belum pernah diterapkan hingga saat ini. Sebab itu, Sutriyono Edi meminta, sinergitas program antar kementerian, lembaga atau instansi terkait dan pelaku usaha guna menerapkan SRG di gudang-gudang tersebut. "Sehingga tujuan pembangunan gudang SRG untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai," ucap Sutriyono Edi.

Selain SRG, Bappebti juga telah mengembangkan Pasar Lelang Komoditas yang dapat dimanfaatkan bagi para pelaku usaha kakao sebagai sarana pemasaran komoditas kakao. Dari Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas di 13 provinsi yang dibina Bappebti, dua di antaranya ada disentra produksi kakao yaitu Sulawesi Tenggara (Kendari) dan Sulawesi Selatan (Makassar).

Di samping itu, pemasaran komoditi kakao juga dapat dilakukan di bursa berjangka. Kakao telah menjadi subyek perdagangan berjangka komoditi di JFX, sehingga diharapkan pembentukan

harga kakao dapat terjadi di Indonesia, sebagai negara produsen kakao ketiga terbesar di dunia.

"Selama ini, pembentukan harga terjadi di bursa berjangka LIFFE, NYBOT, NYMEX dan CME yang terletak di Amerika Serikat dan Inggris, yang notabene bukan merupakan negara produsen kakao," ungkap Sutriyono Edi.

## Identifikasi Potensi

Dalam rangka mempersiapkan SRG untuk kakao, Bappebti telah melakukan identifikasi potensi pelaksanaan SRG Kakao di Kab. Konawe Selatan bersama dengan PT BGR, Bank BRI, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Konawe Selatan, Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara, BP4K serta Koperasi LEM Sejahtera.

Menurut Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa, Retno Rukmawati, berdasarkan hasil identifikasi, pada prinsipnya SRG untuk Kakao siap diimplementasikan di Konawe Selatan. Namun ada beberapa hal yang akan menjadi kendala dalam pelaksanaan SRG untuk kakao. Apa saja?

Pertama, belum adanya harga acuan- referensi harga sehingga petani cenderung mendapatkan harga jual yang rendah, dan lembaga keuangan akan kesulitan menentukan besarnya nilai pembiayaan yang dapat diberikan.

Kedua, kualitas komoditi dari petani yang tidak seragam dan umumnya belum difermentasi. Ketiga, jarak tempuh dari sentra produksi ke lokasi pasar atau pelabuhan yang relatif jauh, serta alat transportasi yang terbatas. Keempat, keterbatasan informasi dan akses pemasaran oleh petani.

Kelima, pada transaksi ekspor, pembayaran umumnya baru dapat dilakukan setelah komoditas dikeluarkan dari gudang. Hal ini terjadi karena pembeli kakao baru akan melakukan pembayaran ketika kakao sudah berada di kapal.

"Dengan demikian, maka Pemegang Resi Gudang harus menyelesaikan terlebih


dahulu seluruh kewajibannya di Bank dan Pengelola Gudang, padahal modal untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut adalah dari hasil penjualan kopi," tutur Retno.

Selain itu, sambung Retno, secara umum perlu diperhatikan juga lemahnya posisi tawar petani kakao Indonesia di pasar internasional, karena kurangnya informasi pasar, dan sistem perdagangan biji kakao di tingkat petani dikuasai oleh eksportir asing. Apalagi kemudian adanya perlakuan diskriminatif di beberapa negara tujuan ekspor seperti Cina, Malaysia, India dan Eropa terhadap produk kakao olahan Indonesia (*cocoa butter* dan *cocoa powder*) dengan pengenaan tarif Bea Masuk (BM) antara 15 persen hingga 38 persen.

Di sisi lain, Retno berharap, dengan pertemuan ini dapat dicapai sinergi antara kementerian, lembaga dan instansi terkait dalam pelaksanaan SRG di lapangan. "Tanpa sinergitas, skema SRG akan sulit diterapkan," tuturnya.

Hal senada juga diungkapkan Sutriyono Edi. Pertemuan tersebut diharapkan akan menghasilkan beberapa poin penting. Di antaranya, pertama, pemetaan kendala yang dihadapi petani dan pelaku usaha atau industri kakao selama ini.

Kedua, pemetaan potensi pemanfaatan SRG bagi para pelaku usaha kakao, baik untuk para petani maupun pelaku usaha lainnya. Ketiga, pola penerapan SRG yang paling tepat dan optimal untuk komoditas kakao, baik pada level hulu untuk para petani maupun hilir yang dimanfaatkan oleh pabrikan, pedagang maupun eksportir.

Keempat, penentuan daerah atau lokasi uji coba pelaksanaan SRG untuk kakao yang dinilai memiliki kesiapan kelembagaan maupun pelaku usaha yang dapat disinergikan dengan Pasar Lelang atau Pasar Fisik sebagai sarana pemasarannya. "Dan terakhir, langkah aksi yang perlu dilakukan setiap Kementerian atau Lembaga dan instansi terkait guna penyiapan pelaksanaan SRG untuk kakao," pungkas Sutriyono Edi. 



## Implementasi SRG Aceh Besar Mengangkat Potensi Komoditi Pangan

***Gudang SRG di Kabupaten Aceh Besar diharapkan dapat mengangkat kesejahteraan petani sebagai lumbung komoditi pangan.***

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi- Bappebti selaku pembina dan pengawas Sistem Resi Gudang- SRG di Indonesia terus mempercepat implementasinya. Seakan tak pernah kenal lelah, Bappebti gencar melakukan sosialisasi SRG diberbagai daerah. Seperti yang dilakukan pada Rabu, 30 September 2015 lalu, Bappebti menggelar acara sosialisasi SRG di Kabupaten Aceh Besar. Tepatnya acara yang didukung Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop UKM) Kabupaten Aceh Besar, ini, dilaksanakan di Gedung

PLUT KUKM, di Desa Pasi Lamgarot.

Acara tersebut dihadiri perwakilan dari Bappebti, perwakilan dari PT Bhanda Ghara Reksha- BGR, perwakilan dari Bank BRI, serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Adapun peserta sosialisasi berjumlah 100 orang yang terdiri dari petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, penyuluh pertanian, koperasi dari Kabupaten Aceh Tengah dan wilayah sekitarnya.

Sekretaris Bappebti, Marthin Simanungkalit, dalam sambutannya mengatakan, sosialisasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan





pemahaman tentang SRG dan mekanismenya, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011, dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor untuk pembangunan ekonomi berbasis pertanian.

"Karena itu para pembicara yang kompeten sudah kami hadirkan untuk berbagi informasi mengenai SRG, diantaranya dari Bappebti, BGR dan Bank BRI," tutur Marthin.

Marthin bilang, melalui informasi yang diberikan diharapkan para peserta dapat

memahami apa itu SRG, apa peranan SRG dalam meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha. Di samping itu, bagaimana memanfaatkan Resi Gudang sebagai agunan di bank, dan bagaimana peran Pengelola Gudang.

Lebih jauh dikatakan Marthin, SRG merupakan suatu instrumen pembiayaan bagi petani, Poktan, Gapoktan, koperasi dan pelaku usaha. Dengan SRG, komoditi pertanian saat ini sudah dapat dipergunakan sebagai jaminan kredit di bank atau lembaga keuangan. "Diharapkan petani, pelaku usaha serta UMKM yang umumnya menghadapi masalah keterbatasan akses pembiayaan dari perbankan serta terbatasnya jaminan atau agunan kredit dapat memperoleh solusi pembiayaan melalui Sistem Resi Gudang," paparnya.

Dia juga berharap, SRG mampu mengubah pola pikir dan budaya petani di daerah yang selama ini hanya sebagai petani pekerja berubah menjadi petani pebisnis untuk memperpendek mata rantai produksi dan pemasaran yang selama ini belum memberikan keuntungan yang besar para petani.

## 7 Gudang

Padi menjadi salah satu komoditas unggulan Provinsi Aceh. Bahkan menurut hasil analisis penelitian berdasarkan kriteria komoditas unggulan, padi menjadi urutan pertama di Provinsi Aceh.

Untuk pengembangan komoditas padi berdasarkan luas panen, tercatat wilayah sentra pengembangan urutan pertama adalah Kabupaten Pidie dengan luas panen 52.555 ha, urutan kedua adalah Kabupaten Aceh Utara dengan luas panen 46.340 ha selanjutnya yang ketiga adalah Kabupaten Bireuen dengan luas panen 38.200 ha. Sedangkan Kabupaten Aceh Besar menempati urutan yang keempat dengan luas panen 36.200 ha. Adapun yang terakhir adalah Kabupaten Aceh timur dengan luas panen 32.062 ha.

Berdasarkan data tersebut, memang sangat tepat jika ada gudang-gudang

SRG di Provinsi Aceh. Berdasarkan data Bappebti, dari Tahun 2009 sampai dengan 2015 gudang yang telah dibangun di Provinsi Aceh terdapat di 7 Kabupaten. Masing-masing di Kabupaten Pidie Jaya, Pidie, Aceh Tengah, Aceh Besar, Simeulue, Bireun dan Bener Meriah.

"Untuk kami mengharapkan gudang SRG yang telah dibangun di Kabupaten Aceh Besar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan para petani," ujar Marthin.

Sebagai informasi, secara akumulatif sampai dengan Agustus 2015, jumlah Resi Gudang yang telah diterbitkan sebanyak 1.987 resi dengan total volume komoditi sebanyak 76.493,25 ton (65.812,07 ton gabah, 5.417,72 ton beras, 4.765,67 ton jagung, 77,79 ton kopi, dan 420 ton rumput laut) atau total senilai Rp 393,77 miliar.

## Sinergitas

Mempercepat implementasi SRG dibutuhkan sinergitas semua stakeholder terkait. Menurut Marthin, berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011, SRG bukan merupakan program pemerintah pusat, dan bukan juga program atau kebijakan Kementerian Perdagangan saja.

Tapi, lanjutnya, keberhasilan pelaksanaan SRG di Indonesia tidak terlepas dari adanya dukungan dan peran aktif antar kementerian/lembaga di sektor pertanian, keuangan, perbankan dan sektor terkait lainnya di pusat maupun daerah dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

"Karena itu, kami mengharapkan komitmen dari Pemerintah Daerah untuk dapat terus berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan SRG dengan dukungan program dan anggaran serta SDM yang profesional," pungkas Marthin Simanungkalit.



## Bursa dan Kliring

# Harus Miliki Strategi Penambahan Modal

***Penambahan modal disetor bursa berjangka dan lembaga kliring hingga minimal Rp 100 miliar, adalah upaya mengarahkan industri perdagangan berjangka komoditi yang kredibel dan berintegritas tinggi. Solusi apa yang akan dilakukan?***

Peraturan Pemerintah N0. 49 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi, telah mengamanatkan bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka agar memiliki modal disetor sedikitnya sebesar Rp 100 miliar. Dan, ketentuan itu telah berlaku efektif sejak diundangkan pada 1 Juli 2014.

Namun hingga satu tahun ketentuan tersebut berlaku, bursa berjangka dan lembaga kliring belum menunjukkan kemampuan untuk menggenapi amanat Peraturan Pemerintah itu. Dengan berbagai dalil yang disampaikan kepada otoritas perdagangan berjangka komoditi- Bappebti, direksi bursa berjangka dan lembaga kliring meminta

penunda hingga satu tahun ke depan.

Bak gayung bersambut, Kepala Bappebti, Sutriyono Edi, dalam sebuah kesempatan mengatakan, kondisi keuangan bursa berjangka dan lembaga kliring memang saat ini tidak memungkinkan untuk memenuhi kewajiban minimal modal disetor sebesar Rp 100 miliar.

"Tetapi ketentuan itu wajib dipenuhi. Karena hal itu adalah amanat PP, yang dimaksudkan untuk menjaga integritas bursa berjangka dan lembaga kliring," tegas Sutriyono Edi.

Sebab itu, Bappebti memberi kelonggaran batas waktu untuk penambahan modal disetor bursa berjangka dan lembaga kliring hingga

Juni 2016.


Meski demikian, Kepala Bappebti berharap pihak bursa berjangka dan lembaga kliring memiliki strategi jitu untuk memenuhi kewajiban tersebut. Salah satu wacana yang dilontarkan Kepala Bappebti, Sutriyono Edi, untuk memperoleh permodalan yakni melalui pasar saham dengan cara *listing* di Bursa Efek Indonesia- BEI. "Kalau mereka *listing* di bursa saham, akan menjadi lebih transparan dan berintegritas," katanya.

"Tetapi sampai saat ini kedua bursa berjangka itu masih mengkaji rencana untuk menaikkan modal disetornya. Ada beberapa pilihan cara yang sedang dikaji, seperti memasukan modal asing, penambahan modal dari pemegang saham yang ada, menjadikan anggota bursa sebagai pemegang saham, dan penawaran saham perdana atau initial public offering- IPO," terang Sutriyono Edi.

Sebagai gambaran, sampai saat ini modal disetor dari dua bursa berjangka yang ada, masih sangat jauh di bawah Rp 100 miliar seperti yang diamanatkan PP No. 49 Tahun 2014. JFX misalnya, jumlah modal disetor baru mencapai senilai Rp 11,6 miliar, sedangkan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia- BKDI memiliki modal disetor senilai Rp 40 miliar.

Dirut Jakarta Futures Exchange- JFX, Stephanus Paulus Lumintang, terkait hal itu mengatakan, alternatif penambahan modal disetor sudah dirumuskan jajaran direksi. Namun alternatif mana yang akan dipilih akan diputuskan melalui rapat umum pemegang saham- RUPS.

"Kalau secara pribadi, saya akan memilih alternatif yang lebih memudahkan bagi pihak direksi. Tetapi itu 'kan tidak mungkin sekehendak saya. Jadi kita tungguilah apa nantinya hasil RUPS," jelas Paulus.

"IPO di bursa saham memang strategi yang elegan untuk menambah permodalan, tetapi untuk sampai ke arah itu perlu perjuangan dan kerja keras," imbuh Stephanus Paulus Lumintang. 





## Serah Fisik Emas 'Made in JFX'

**M**enghadihkan sekeping emas kepada seorang yang dikasihi tentunya akan menjadi kenangan terindah sepanjang masa. Sekiranya itulah yang dilakukan Paulina Samson, bertransaksi kontrak berkala emas- KBE melalui perusahaan pialang berjangka PT Jalatama Artha Berjangka- JAB.

Menjadi nasabah di JAB pada medio Juli 2015, lalu, Paulina Samson sudah berniat memperoleh emas batangan seberat 10 gram yang akan dijadikan mahar akad nikah untuk anggota keluarganya.

"Investasi emas- KBE ini cukup menarik dan sangat mudah untuk melakukannya. Saya mendapat penjelasan investasi emas ini melalui seminar singkat yang diselenggarakan JAB. Karena saya lihat prospeknya cukup bagus, maka saya tertarik dan berinvestasi dengan modal seadanya. Semula saya mau memperoleh uang tunai dari keuntungan transaksi emas itu, tetapi karena ada sanak keluarga yang akan menikah maka saya akan hadiahkan emas tersebut sebagai mahar," kata Paulina Samson.

Itulah sekelumit testimoni singkat

Paulina Samson saat serah terima fisik emas dihadapan Direksi Jakarta Futures Exchange- JFX, PT Kliring Berjangka Indonesia- KBI, JAB, Kepala Biro Perniagaan Bappebti, Pantas Lumban Batu, dan awak media pada 9 September 2015, lalu, di Gedung JFX, Jakarta.

Pada kesempatan itu, serah terima fisik emas diberikan kepada dua orang nasabah yakni masing-masing 1 lot KBE. Dalam keterangannya, Dirut JFX, Stephanus Paulus Lumintang, mengatakan, serah terima fisik ini merupakan yang pertama untuk kontrak KBE di Jakarta sejak diluncurkan pada September 2013 lalu.

Sebelumnya serah terima fisik emas KBE telah direalisasikan kepada nasabah anggota kliring PT Victory International Futures di PT Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya. Penyerahan fisik KBE kedua juga diberikan kepada nasabah di Surabaya yang difasilitasi anggota kliring PT Kresna Investa Futures.

Di pihak lain, Dirut KBI, Tris Sudarto, menjelaskan, nasabah dapat langsung menerima fisik KBE dari KBI selaku penjamin penyelesaian transaksi. Atau bisa langsung mengambil di kantor

Pegadaian di Kota Medan, Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan Makassar. Tetapi tentunya dibekali surat pengantar dari KBI.

"Sebagai penjamin penyelesaian transaksi, KBI memastikan nasabah akan mendapatkan kepastian ketersediaan fisik emas, sesuai dengan jumlah pesanan dan standar Antam. Saat jatuh tempo, nasabah bisa mengambil fisik sesuai opsi yang ditawarkan," jelas Tris Sudarto.

## Keunggulan KBE

**L**ebih jauh diungkapkan Stephanus Paulus Lumintang, produk KBE dirancang untuk menjangkau seluruh konsumen, termasuk kelas ritel, sehingga satuan lotnya tergolong kecil. Kontrak dengan kode GG di JFX ini bisa diperdagangkan mulai dari lot setara dengan 5 gram (GG5), 10 gram (GG10), 25 gram (GG25), 50 gram (GG50), hingga 100 gram (GG100). Kualitas fisik emas KBE juga terjamin dengan sertifikat ANTAM.

"Masyarakat dapat memanfaatkan KBE, sebagai transaksi jual beli emas pertama yang menggabungkan mekanisme transaksi fisik dengan transaksi kontrak berjangka. Untuk memperoleh nilai keuntungan yang diinginkan, investor bisa mempertahankan transaksi kontrak berjangkanya tanpa batas waktu atau menyimpannya dalam bentuk barang fisik," jelas Paulus.

Dibandingkan dengan produk sejenisnya, tambah Paulus, KBE merupakan perpaduan dari tabungan, gadai dan cicilan emas dengan berbagai kelebihan. Harga transaksi juga mengacu harga spot, dengan jatuh tempo bulanan, dan dapat dilakukan gulir secara otomatis ke bulan berikutnya.

KBE juga memiliki fitur yang memudahkan nasabah, seperti transaksi menggunakan layanan elektronik *online*, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya transport. Besaran cicilan suka-suka, dapat disesuaikan dengan kemampuan nasabah dan tanpa batas waktu dengan penambahan margin.



## Peresmian Gudang SRG di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung

Kepala Bappebti yang diwakili oleh Kepala Biro Perniagaan Bappebti, Pantas Lumban Batu memberikan sambutan dalam rangka peresmian operasional Gudang Sistem Resi Gudang yang dipusatkan di Pekon Marang, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, Rabu (30/09).

Dalam sambutannya Pantas Lumban Batu, menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Gubernur Lampung beserta Jajarannya dan Bupati Pesisir Barat beserta jajarannya yang telah berkomitmen dan mendukung terlaksananya SRG khususnya di Provinsi Lampung. Kabupaten Pesisir Barat merupakan Kabupaten keempat yang telah menerbitkan Resi Gudang setelah Lampung Selatan, Tulang Bawang dan

Tanggamus.

Peresmian ditandai dengan pemotongan pita yang dilakukan oleh Sekda Prov Lampung, Ainal Djunaedi. Dalam kesempatan tersebut, juga diterbitkan Resi Gudang Gabah dengan volume 10 ton yang diagunkan ke Bank Lampung dengan nilai Rp30 juta dan 50 ton gabah yang masih dalam proses penerbitan Resi Gudang.

Acara tersebut dihadiri oleh Sekda Prov Lampung, Ainal Djunaedi mewakili Gubernur Lampung, Penjabat Bupati Kabupaten Pesisir Barat, Qodratul Ikhwani BY, Anggota DPRD Kab Pesisir Barat, Pimpinan Kelembagaan dalam Sistem Resi Gudang (PT. KBI, PT. BGR), Perbankan, Poktan dan Gapoktan.

## Sosialisasi SRG di Cilacap, Jawa Tengah

Bappebti bekerjasama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Cilacap mengadakan Sosialisasi Sistem Resi Gudang di Gedung Persatuan Wanita Patra (PWP) Cilacap, Jawa Tengah, 10 September 2015.

Acara diawali dengan kata sambutan dari Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM, Dian Arinda Murni dan dilanjutkan dengan arahan dari Sekretaris Bappebti, Marthin yang sekaligus membuka acara.

Hadir sebagai narasumber adalah Sukardi selaku perwakilan dari Bappebti, Judi Adi Nugroho selaku perwakilan dari Disperindag Cianjur, dan Yopi Laksmana Pramadati selaku perwakilan dari BRI. Dan sebagai moderator adalah Ismadjaja Tungkagi, Staf Ahli SRG Bappebti.

Sosialisasi ini dihadiri oleh 100 peserta yang terdiri dari Gapoktan, Poktan, Petani, Dinas Cilacap, dan pelaku usaha lainnya.







## Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK

Kepala Biro Perniagaan Bappebti, Pantas Lumban Batu mewakili Kepala Bappebti memberikan pengarahan dalam acara pelatihan Teknis Pelaku Usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) yang dilaksanakan pada tanggal 28-29 September 2015 di Bali. Adapun tema kegiatan yaitu, "Peningkatan kemampuan, keterampilan dan pengetahuan tentang transaksi kontrak berjangka secara multilateral."

Dalam pengarahannya, dia mengharapkan para peserta yang mengikuti pelatihan teknis di Bali dapat melatih calon nasabah untuk dapat melakukan transaksi kontrak berjangka secara multilateral, serta dapat menjelaskan mekanisme transaksi kontrak berjangka secara multilateral dengan baik. "Sehingga nasabah dapat tertarik untuk bertransaksi kontrak

berjangka secara multilateral," ujarnya.

Pelatihan Teknis ini menghadirkan pembicara dari Bappebti, Jakarta Futures Exchange (JFX), Kliring Berjangka Indonesia (KBI), Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), Indonesia Clearing House (ICH) dan Aspebtindo.

Kegiatan Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK dilakukan selama 2 hari yang dihadiri oleh 72 orang peserta. Mereka terdiri dari para Karyawan *Desk Commodity* dari 27 Perusahaan Pialang Berjangka yang tersebar di wilayah Provinsi Jawa Timur (Malang, Kediri dan Jember), Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Papua.

## Bappebti Gelar Rapat Pembangunan Modul Sistem Pengawasan SPA

Dalam rangka Pembangunan Modul Sistem Pengawasan SPA (Sistem Perdagangan Alternatif), Bappebti mengadakan rapat bersama *Self-Regulatory Organization* (SRO) yang terdiri dari PT. Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), PT. Kliring Berjang Indonesia (KBI), PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), dan PT. Indonesian Clearing House (ICH) di Ruang Rapat Bappebti, Jakarta, 4 September 2015.

Rapat dibuka oleh Kepala Bappebti, Sutriyono Edi yang didampingi oleh Sekretaris Bappebti, Marthin dan Kepala Biro Perniagaan, Pantas Lumban Batu beserta Kepala Biro Hukum, Sri Hariyati. Rapat ini dihadiri juga oleh Direktur PT. BBJ, Direktur PT. KBI, Direktur PT. BKDI, dan Direktur ICH.

Rapat ini bertujuan agar Bappebti dan SRO dapat bersama-sama membangun modul Sistem Pengawasan SPA untuk semakin meningkatkan keamanan dalam industri Perdagangan Berjangka Komoditi.





## Bank Standard Chartered Mundur dari Industri PBK

**S**tandard Chartered Bank Indonesia- SCBI tak lagi menjadi bank penyimpanan margin di industri perdagangan berjangka komoditi- PBK, setelah Bappebti mencabut persetujuan sebagai bank penyimpanan margin, dana kompensasi dan dana jaminan.


Pencabutan izin SCBI itu secara resmi ditetapkan Bappebti di Jakarta, 17 September 2015. Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Bappebti No. 03/BAPPEBTI/KEP-PENCABUTAN/BPM/09/2015 tentang Pencabutan Persetujuan Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan Kepada Standard Chartered Bank, Indonesia.

Pada SK Kepala Bappebti itu dijelaskan, pada 18 Mei 2015, lalu, pihak SCBI telah melayangkan surat permohonan pengunduran dirinya sebagai Bank Penyimpan Margin, dengan No. Surat: 011/TB-WB/V/2015.

Sebab itu, Bappebti dalam SK Kepala Bappebti No. 03/BAPPEBTI/KEP-PENCABUTAN/BPM/09/2015, mengeluarkan

empat keputusan. Kesatu, mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Kepala Bappebti No. 88/BAPPEBTI/SP/12/2011 tanggal 06 Desember 2011 tentang Persetujuan Terhadap Bank Umum Sebagai Bank Penyimpan Margin, dan Kompensasi dan Dana Jaminan kepada Standard Chartered Bank Indonesia.

Kedua, pencabutan Persetujuan sebagaimana pada diktum Kesatu tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab SCBI terhadap segala tuntutan atas tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian terhadap Pialang Berjangka yang memiliki rekening terpisah di SCBI sebagai Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Ketiga: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya. 

## Bappebti Bekukan Izin EQB dan Izin JTB Dicairkan

**K**egiatan usaha PT. Equilibrium Komoditi Berjangka- EQB resmi dibekukan Bappebti per 30 September 2015, berdasarkan Keputusan Kepala Bappebti No. 09/BAPPEBTI/KEP-PEMBEKUAN/SA/09/2015.

"Pembekuan kegiatan usaha tersebut dilakukan karena PT. Equilibrium Komoditi Berjangka tidak memenuhi ketentuan Modal Bersih Disesuaikan, sesuai ketentuan yang berlaku di bidang perdagangan berjangka komoditi. Sehingga tidak dapat mempertahankan integritas keuangan dan reputasi bisnis yang dipersyaratkan," jelas keterangan pers dari Biro Hukum Bappebti.

Meski izin EQB sudah dibekukan, tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab perusahaan terhadap tuntutan nasabah atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi nasabah.

"Dengan dibekukan kegiatan usaha itu, maka Bappebti juga membekukan semua izin Wakil Pialang Berjangka pada EQB," tegas Biro Hukum Bappebti.


### Pencairan JTB

**D**i pihak lain, pengurus PT. Jireh Trillions Berjangka- JTB kini dapat bernafas lega karena izin usaha yang telah dibekukan sejak 21 Januari 2013, telah dicairkan kembali oleh Bappebti berdasarkan Keputusan Kepala Bappebti No. 03/BAPPEBTI/KEP-PENCAIRAN/SA/09/2015 tentang Pencairan Pembekuan Kegiatan Usaha Pialang Berjangka Atas Nama PT. Jireh Trillions Berjangka. Surat tersebut resmi diterbitkan di Jakarta, Senin, 28 September 2015 lalu.

Menurut keterangan pers Biro Hukum Bappebti, pencairan pembekuan kegiatan usaha JTB berdasarkan permohonan

pencairan kegiatan usaha yang diajukan oleh Direktur Utama PT. Jireh Trillions Berjangka kepada Bappebti.

Faktor lainnya yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa JTB telah memenuhi persyaratan Modal Disetor dan Modal Bersih Disesuaikan serta telah memenuhi persyaratan prasarana dan sarana fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Pencairan pembekuan kegiatan usaha JTB tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab perusahaan apabila terdapat tuntutan nasabah atas segala tindakan atau pelanggaran yang dilakukan selama masa pembekuan kegiatan usaha. Dengan dicairkannya pembekuan kegiatan usaha tersebut, maka JTB dapat kembali melakukan transaksi multilateral di bursa berjangka," tulis Biro Hukum Bappebti. 





## Komoditi Teh Masuk Bursa Berjangka

Komoditi teh resmi ditetapkan sebagai salah satu komoditi yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka. Hal itu berdasarkan Peraturan Kepala (Perka) Bappebti No. 123/BAPPEBTI/PER/08/2015 tentang perubahan ketiga atas peraturan Kepala Bappebti No. 90/BAPPEBTI/PER/10/2011 tentang komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan di bursa berjangka.

Perka Bappebti No. 123 Tahun 2015 tersebut dikeluarkan di Jakarta, 31 Agustus 2015. Sekedar informasi, sebelumnya Perka Bappebti No. 90 Tahun 2011 telah mengalami beberapa kali perubahan dengan Perka Bappebti: a. No. 94/BAPPEBTI/

PER/04/2012; b. No. 114/BAPPEBTI/PER/12/2014.

"Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka adalah: a. di bidang pertanian dan perkebunan: 1. kopi; 2. kelapa sawit dan turunannya; 3. karet; 4. kakao; 5. lada; 6. mete; 7. cengkeh; 8. kacang tanah; 9. kedelai; 10. jagung; 11. kopra; dan 12. Teh," demikian bunyi Pasal 1 Perka Bappebti Nomor 123 tahun 2015.

Dengan itu, jika dalam Perka Bappebti 114 Tahun 2014, komoditi di bidang pertanian dan perkebunan hanya berjumlah 11, maka dengan masuknya teh dalam Perka Bappebti Nomor 123 tahun 2015, jumlahnya bertambah menjadi 12 komoditi.❧

## 9 Permendag Baru Diterbitkan

Ukai diterbitkannya Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I Presiden Joko Widodo pada 9 September 2015, lalu, jajaran Kementerian Perdagangan bergerak cepat mengimplementasikan kebijakan tersebut. Dari 32 Peraturan Menteri Perdagangan- Permendag yang terdiri dari 24 peraturan yang didebirokratisasi dan 8 peraturan yang dideregulasi, terdapat 9 Permendag baru diterbitkan oleh Menteri Perdagangan Thomas T. Lembong.

Berikut ini 9 Permendag yang telah diterbitkan Kemendag;

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir (API);
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/M-DAG/PER/9/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/9/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74/M-DAG/PER/9/2015 tentang Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/9/2015 tentang Pencabutan Atas Keputusan

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/KEP/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh;

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76/M-DAG/PER/9/2015 tentang Pencabutan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2010 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik Isi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/5/2012;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/9/2015 tentang Pencabutan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/12/2011 tentang Ketentuan Impor Sodium Triphosphosphate (STPP);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/9/2015 tentang Pencabutan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/6/2015 tentang Ketentuan Impor Ban.

Dari 9 Permendag tersebut, lanjut Mendag, ada 5 Permendag yang langsung berlaku segera setelah ditandatangani yaitu Permendag mengenai perdagangan gula antarpulau, impor cengkeh, cakram optik, STPP, dan impor ban.

Sedangkan Permendag mengenai Label akan berlaku per 1 Oktober 2015, sementara Permendag mengenai API berlaku pada 1 Januari 2016, Permendag mengenai impor hortikultura berlaku pada 1 Desember 2015, dan Permendag SNI berlaku satu bulan setelah ditandatangani.❧



## RI Bertekad Geser Brasil Sebagai Penyuplai Kopi Terbesar Dunia

Indonesia memiliki ambisi menggeser Brasil sebagai penyuplai kopi peringkat wahid dunia. Saat ini, Indonesia berada di posisi kelima. Posisi pertama penyuplai kopi dunia ditempati Brasil, kedua diisi Vietnam, ketiga Kolombia, dan keempat Jerman.

"Indonesia harus bisa menjadi penyuplai kopi peringkat pertama dunia," tegas Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional- Dirjen PEN, Nus Nuzulia Ishak, di Jakarta, belum lama ini.

Untuk mencapai itu, serangkaian kegiatan dilakukan Ditjen PEN seperti menggelar acara di arena World Expo Milano (WEM) 2015, pada 28 September-2 Oktober 2015 di Milan, Italia.

Bersama Gabungan Asosiasi Eksportir Kopi (GAEKI), Ditjen PEN memperkenalkan eksotisme dan rasa magis kopi Indonesia di arena WEM 2015 melalui kegiatan *cupping & networking*, *display* khusus, serta pembagian kopi gratis selama seminggu. Kopi yang disajikan berasal dari seluruh sentra penghasil kopi di Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, Bali dan Flores, Sulawesi, serta Papua.

"Puncaknya, untuk memperingati hari kopi internasional pertama, akan diadakan pembagian kopi Luwak sekaligus penggalangan dana dari pengunjung WEM. Dana tersebut nantinya akan diserahkan kepada para petani kopi di Indonesia agar menghasilkan kopi yang lebih berkualitas," kata Nus.

Menurut Nus, konsumen kopi di Italia merupakan yang terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan Jerman. Di Uni Eropa, Italia adalah konsumen terbesar kedua di bawah Jerman, dengan konsumsi sebanyak 546,78 ribu ton pada 2014. Potensi yang besar ini, menurut Nus, perlu dibarengi upaya keras menggenjot posisi Indonesia sebagai penyuplai kopi ke-5 dunia dari 348,83 ribu ton tahun lalu, agar dapat menggeser empat besar penyuplai kopi dunia.

"Budaya minum kopi begitu erat di Italia. Kita kenalkan racikan kopi terbaik nusantara. Kemudian pasar kopi yang begitu tinggi ini hendak kita rebut dan alihkan dari biji kopi menjadi kopi olahan," tegas Nus Nuzulia Ishak.

## Pasokan Turun Harga Lada Lampung Ikut Turun

Permintaan komoditi lada di Provinsi Lampung untuk tujuan ekspor pada akhir September 2015, mengalami penurunan, hal ini dibarengi pula dengan menurunnya harga komoditas unggulan tersebut. Di sisi lain, produksi tanaman lada cenderung menurun karena cuaca kering yang berkepanjangan. "Saat ini permintaan pasar dunia sedang menurun, sehingga harganya ikut turun," kata Adi (39) pengepul komoditas unggulan di Kec. Telukbetung Selatan, Bandarlampung, baru-baru ini kepada Antara. Dikatakan, harga lada hitam hanya Rp 118.000/kg dari sebelumnya mencapai Rp 120.000/kg. Sedangkan lada putih Rp 145.000/kg dari harga sebelumnya, Rp 150.000/kg hingga Rp 160.000/kg. Lebih jauh dikatakan Adi, kebutuhan ekspor memang sedang menurun sedangkan penjualan dari petani ke pengepul masih stabil. "Petani lada banyak yang enggan menjual hasil kebunnya, mengingat mereka menjualnya pada saat membutuhkan uang," katanya. Menurut Adi, harga lada di kisaran Rp 118.000/kg masih relatif tinggi, ini juga disebabkan karena kurs dolar AS yang masih menguat terhadap rupiah.

## Kakao Asal Banten Diminati Eksportir

Kakao asal Banten sangat diminati eksportir terutama untuk tujuan negara-negara Asia dan Eropa. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Provinsi Banten Agus Purnohadi. Menurutnya, keunggulan kakao Banten yaitu memiliki kadar air di bawah 6-7 % dan kualitasnya sudah sesuai standar internasional.

"Selama ini, komoditas kakao menjadikan andalan petani Kabupaten Lebak, Pandeglang dan Kabupaten Serang," terang Agus Purnohadi.

Saat ini, kakao Banten diekspor melalui perusahaan dari Bandung dan Jakarta ke beberapa negara Asia, di antaranya Korea Selatan dan Jepang. Selain itu juga diekspor ke beberapa negara di Eropa seperti Italia, Belanda, Jerman dan Inggris.

Sebagai gambaran, produksi kakao Banten tahun 2014 sebanyak 2.324 ton dengan luas tanaman kakao sebesar 7.397,18 hektar. Dari seluas itu, di antaranya milik perkebunan swasta seluas 1.022,65 hektar dan rakyat seluas 6.374,53 hektar.

Agus Purnohadi optimis produksi kakao Banten tahun 2015 meningkat mencapai 3.188,11 ton dengan luas tanam 9.262,86 hektar. "Meningkatnya produksi tersebut karena tingginya permintaan pasar domestik dan mancanegara," ungkapnya.





## Cocoa Future trading has strengthened Indonesia's position as the world third biggest producer

Ministry of Trade has been continuously tried to strengthen Indonesian's position as world third biggest cocoa producers (after Cote d'Ivoire and Ghana). One of the ways is to increase the comprehensive capacity of the policy maker and stakeholders on cocoa global supply chain.

The general director of International Trading cooperation – KPI of Ministry of Trade, Bachrul Chairi, has mentioned recently in one event that cocoa commodity has given big contribution for Indonesian economic. "Indonesian cocoa production in 2014 has reached 700 thousand tons, with the export value of USD 1,244.5 million. Therefore we need to utilize the capacity improvement programs to maintain domestic market dynamics," he said.

This effort was supported by conducting seminar of Cocoa on Futures Markets and Econometric Modeling in Kuta, Bali some time ago. This seminar is also a part of capacity affirmation and

enhancement of International Cocoa Organization-ICCO that has been negotiated on the 86<sup>th</sup> council meeting in September 2012.

In accordance with Bachrul Chairi, this activity is also become the event for cocoa stakeholders from upstream to downstream sector to interact and upgrade each other business networking.

The chief of Coftra, Sutriyono Edi, on the same event also mentioned that the activity will improve market players and policy makers capacity to increase the comprehension on cocoa futures market function and role and cocoa market econometric modeling for forecasting cocoa supply, demand and cocoa market price.

"With this activity it is expected that business player comprehends the knowledge on futures trading so that market players can utilize hedging mechanism in futures exchange to minimize the risk of price fluctuation," Sutriyono Edi explained.

## Elevate seaweed export by warehouse receipt system



South Sulawesi provincial government as one of central production of competitive commodities has launched "The movement of 3 times export elevation." One of the strategies that they do to accomplish export elevation is the implementation of warehouse receipt system- SRG of seaweed.

According to Indonesia Seaweed Association- ARLI, Indonesian seaweed export has reached 200 thousand tons in 2014. From that amount, South Sulawesi province has given

contribution approximately 124 thousand tons, so no wonder if South Sulawesi province is well known as the biggest seaweed central industry in Indonesia.

Moreover from the production side, the other thing that is equally important is facilitating and supporting the business players who will export. On this side, warehouse receipt system has held an important role.

"The influx of seaweed commodity as one of warehouse receipt subjects will be able to support the export increase of South Sulawesi. As SRG is an instrument of delay sale that not only can be used by the farmers, farmers group, farmers group merger, or even farmers union as an instrument for trade finance. And not only for that, warehouse receipt system can be useful for export players or trader to get quality assurance and quantity of traded commodity," Sutriyono Edi explained.

Besides that, Sutriyono added that exporter can get fix commodity supply. The reason is because the existence of stored commodity quantity in warehouse receipt system warehouse can be exactly known. Exporter also can get revolving loan from bank for the same working capital and will get bigger trading turnover by getting Bank's loan using the warehouse receipt guarantee.

"The other benefit is warehouse receipt system will help expediting liquidity because this instrument can be used as funding mortgage, tool of trading, and as one of confirmation documents for Letter of Credit in foreign trading," Sutriyono Edi explained.



+62816105xxx

**Kami menerima undangan Bappebti dengan nomor 329/BAPPEBTI/WS/X/2015 Perihal Workshop Nasional "Penyelesaian Sengketa Perdata Pasar Modal" melalui email yang meminta kami mengirimkan sejumlah uang investasi. Mohon konfirmasi kebenaran undangan tersebut?**

**Jawaban:**

Yth Bapak/Ibu

Sehubungan dengan informasi yang kami terima mengenai Undangan Workshop Nasional "Penyelesaian Sengketa Perdata Pasar Modal" yang disampaikan ke masyarakat dengan mengatasnamakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), maka dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bappebti, dalam hal ini Kepala Bappebti tidak pernah mengeluarkan Surat Undangan acara Seminar Nasional dengan nomor 329/BAPPEBTI/WS/X/2015 mengenai Workshop Nasional "Penyelesaian Sengketa Perdata Pasar Modal" dan tidak pernah bekerjasama dengan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia untuk penyelenggaraan workshop seperti dimaksud di atas.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Bappebti memiliki tugas pokok fungsi dalam hal pembinaan, pengawasan, pengaturan dan pengembangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, dan bukan di bidang Pasar Modal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami menghimbau para stakeholders dan seluruh anggota masyarakat agar tidak mengindahkan undangan tersebut dan berhati-hati dalam menerima setiap informasi yang mengatasnamakan Bappebti.

Demikian kami sampaikan, informasi lebih lanjut silakan kunjungi situs resmi Bappebti di [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)

**Layanan SMS Center BAPPEBTI**

Jika Anda mempunyai informasi atau pertanyaan mengenai kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditi (PLK) sesuai dengan tupoksi BAPPEBTI Kementerian Perdagangan, dapat disampaikan melalui SMS 0811-1109-901

Dengan format NAMA (spasi) DOMISILI (spasi) ALAMAT EMAIL (spasi) PESAN

\*SMS dikenakan biaya regular (tergantung dari masing-masing provider telepon)

## Glossary

### 1. Call option

A contract giving the buyer the right to purchase something within a certain period of time at a specified price. The seller receives money (the premium) for the sale of this right. The contract also obligates the seller to deliver, if the buyer exercises his right to purchase.

### 2. Canceling Order

An order that deletes a customer's previous order.

### 3. Carrying Charge

For physical commodities such as grains and metals, the cost of storage space, insurance, and finance charges incurred by holding a physical commodity.

### 4. Carryover

Grain and oilseed commodities not consumed during the marketing year and remaining in storage at year's end.

### 5. Cash Commodity

An actual physical commodity someone is buying or selling, e.g., soybeans, corn, gold, silver, Treasury bonds, etc. Also referred to as actuals.

### 6. Cash Contract

A sales agreement for either immediate or future delivery of the actual product.

### 7. Cash Market

The market for the cash commodity (as contrasted to a futures contract), taking the form of: (1) an organized, self-regulated central market (e.g., a commodity exchange); (2) a decentralized over-the-counter market; or (3) a local organization, such as a grain elevator or meat processor, which provides a market for a small region.

### 8. Cash on Delivery

Payment for goods is made upon delivery. See Delivery versus Payment.

### 9. Cash Price

The price in the marketplace for actual cash or spot commodities to be delivered via customary market channels.

### 10. Cash Settlement

A method of settling certain futures or option contracts whereby the seller (or short) pays the buyer (or long) the cash value of the commodity traded according to a procedure specified in the contract.





## Transaksi Resi Gudang Bulan September 2015

		PENERBITAN					PEMBIAYAAN		
NO	PENGELOLA GUDANG / GUDANG	Komoditi	Jumlah Resi Gudang	Jumlah Komoditi (Ton)	"Harga (Rp/kg)"	" Nilai Barang (Rp) "	Jumlah Resi Gudang	" Nilai (Rp) "	Bank/ LKNB
1	PT. Pertani								
	- Sidrap	Gabah	2	252	5.771	Rp1.454.250.000	-	-	-
2	Koperasi Niaga Mukti								
	- Cianjur (Warungkondang)	Gabah	3	54	6.000	324.000.000	3	225.000.000	Bank BJB
3	PT. BGR								
	- Bener Meriah	Kopi	1	30,5	60.000	1.830.000.000	1	1.150.000.000	Bank BRI
	- Tanggamus	Gabah	2	40,03	5.200	208.171.600	2	144.000.000	Bank BJB
	- Kepahiang	Kopi	1	4,99	19.000	94.715.000			
	- Demak (Dempet)	Gabah	1	38	5.800	220.400.000			
	- Demak (Mulyoharjo)	Gabah	1	22,25	5.800	129.050.000	1	75.000.000	Bank Jateng
	- Pesisir Barat	Gabah	1	10	5.200	52.000.000	1	30.000.000	Bank Lampung
4	PT Pos Indonesia								
	- Tasikmalaya	Gabah	16	307,30	5.586	1.716.425.000	15	1.115.000.000	Bank BJB
		Jagung	1	25,80	4.200	108.360.000	1	75.000.000	Bank BJB
	- Ciamis	Gabah	5	43,50	5.500	239.250.000	2	63.525.000	Bank BJB
5	KUD Tuntung Pandang								
	- Barito Kuala	Gabah	10	147,99	7.000	1.035.895.000	7	634.800.000	Bank KalSel
6	PT. Food Station Tjipinang Jaya								
	- Ngawi	Beras	11	661,50	8.500	5.622.750.000	11	3.935.925.000	PKBL KBI
JUMLAH		Gabah	41	915	5.762	5.379.441.600	31	2.287.325.000	
		Beras	11	662	8.500	5.622.750.000	11	3.935.925.000	
		Jagung	1	26	4.200	108.360.000	1	75.000.000	
TOTAL			53	1.602		11.110.551.600	43	6.298.250.000	

Keterangan :

\*) : Gudang Pemerintah

30 November 2014  
Biro Pasar Fisik dan Jasa, BAPPEBTI



Bentar aja kok,,,

Begini loh, Bee. Beberapa hari lalu aku dan keluarga ku liburan 'tuh, ke Garut, Jawa Barat. Terus disepanjang jalan aku melihat banyak petani yang membuang komoditi tomat hasil panennya.

Lalu aku pun bertanya kepada salah satu bapak petani itu, mengapa mereka membuang tomat hasil panennya,,,? Terus tau ngak apa jawabnya? "Karena harga tomat tidak menguntungkan dan hasil panen yang berlimpah."

Terus disepanjang jalan aku ingat kamu Bee,,, kamu 'kan sering cerita 'tuh tentang SRG, kenapa ngak dimasukan aja komoditi tomat itu ke gudang SRG,,,?



Oh itu yang mau kamu ceritakan???

Begini Peb, salah satu syarat penting komoditi yang bisa dimasukan ke gudang SRG adalah hasil pertanian yang memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan.

Jadi tidak semua komoditi yang boleh dimasukan ke gudang SRG, Peb,,,

Kalau berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan No. 08/M-Dag/Per/2/2013, komoditi yang bisa dimasukan ke gudang SRG ada sebanyak 10 komoditi. Yakni komoditi gabah, beras, jagung, kakao, kopi, lada, karet, rotan, rumput laut dan garam.

Selain itu Peb, jumlah komoditi secara ekonomis yang disimpan di gudang SRG adalah sekitar 20 ton untuk setiap Resi Gudang yang akan diterbitkan.





# Syarat Komoditi SRG





\*) Tumpal Sihombing

# Realisir Potensi Perdagangan Berjangka

 **CME Group**  
A CME/Chicago Board of Trade/NYMEX Company

Berdasarkan UU RI No. 10 tahun 2011, Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya.

Apa manfaat nyata PBK? Berikut ilustrasi naratifnya:

“Pucuk dicinta ulam tiba,” ujar sang petani kopi arabika dalam hatinya saat melihat ladangnya. Di ladang kampung, buah tanaman kopi sudah berwarna merah, matang sempurna. Selain warna aromanya pun terasa harum. Para pekerjaannya dengan riang memanen buah kopi merah. Masa panen 4 (empat) bulan sedang berlangsung. Musim panen buah kopi arabika nusantara umumnya berawal Mei/Juni dan berakhir Agustus/September, panen setiap 4 (empat) tahun.

“Puji syukur bagi Tuhan, akhirnya menuai juga,” gumam

sang petani dengan bayangan sekian gepok uang jutaan rupiah di benak hasil keuntungan penjualan kopinya, hasil kerja kerasnya selama 4 (tahun) terakhir. Air matanya tak terasa menitik penuh rasa syukur dan haru. Bumi mengaruniakan sang petani buah kopi baik yang siap proses. “Tugas berat selanjutnya menanti,” pikir sang petani membayangkan tugas sekian minggu ke depan, yaitu pemrosesan ala basah buah kopi arabika, dari sortasi buah, pengupasan kulit, fermentasi, pencucian, penjemuran, pengupasan kulit tanduk dan ari, sortasi biji hingga pengemasan dan pengeringan.

Besar tenaga dan biaya keluar selama periode panen dan pemrosesan. Itu adalah pengorbanan (atau biaya dalam kamus ekonomi) yang telah keluar dari kocek sang petani. Hanya satu yang bisa menggantikan pengorbanan itu, profit penjualan. Pertanyaan : berapa harga biji kopi saat dijual nanti oleh si bapak petani? Harga jual harus lebih





tinggi dari pada biaya yang keluar.

Selama periode panen, tentu banyak kopi beredar di pasar dengan harga yang variatif dan fluktuatif versi ijon. Terkait hal ini, ada 3 (tiga) hal yang menjadi momok bagi sang petani, yaitu : (1) semakin banyak kopi beredar, semakin murah harganya; (2) jika tiba musim hujan, maka kualitas buah kopi yang kurang jemur akan menghasilkan biji berkualitas rendah; (3) semakin lama barang ditahan di gudang, keputusan banting harga semakin tendensius di sisi suplai. Hal pertama praktis menurunkan harga, karena volume besar. Hal kedua, kualitas kopi yang rendah menurunkan harga. Hal ketiga, rendahnya harga di pasar menyebabkan ada petani yang menahan niat penjualan kopinya, berharap tiba waktu baik di mana harga jual di atas biayanya. Untuk sementara mungkin bisa ditumpuk di gudang. Namun komoditas ada masa kadaluarsa.

Dari kondisi ini sang petani jelas sudah tak punya

*bargaining power* dalam *price discovery mechanism* komoditi yang merupakan hasil produksi mereka sendiri. Akhir cerita, sang petani terpaksa menjual kopinya dengan harga miring (jual rugi). Sang petani kembali menitikkan air mata. Bukan karena haru, namun akibat menanggung derita kerugian penjualan.

Apakah praktek pasar seperti ini fair? No! Apakah mekanisme seperti ini bisa membuat pasar komoditi di nusantara bangkit? No way!!! Jangankan bangkit, bisa tetap eksis saja sudah syukur. Lalu bagaimana caranya agar kegiatan riil di sisi suplai (elemen petani selaku partisipan di ranah mikro) bisa tumbuh paralel dengan perekonomian nasional yang kaya komoditi?

Selama harga pasar wajar dan transparan belum tersedia bagi sang petani, akan sulit *sustain*, apalagi bangkit. Ada barang, ada harga, *supply-demand* bertemu, pasar terbentuk. Singkat kata, keberadaan harga adalah *necessary*. Lalu, apa dan siapa yang berperan menyediakan informasi harga ini?

Di Indonesia, ada lembaga yang mumpuni dalam hal perdagangan berjangka (PBK) yakni Bursa Berjangka Jakarta- BBJ. Harga terbentuk dalam PBK di tingkat industri, di mana Bursa Berjangka- BBJ adalah entitas yang berperan *menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/ atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif Syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya*. BBJ secara umum memiliki 3(tiga) fungsi yaitu (1) *price reference provider*; (2) *hedging provider*; (3) pelaku fungsi pengawasan pasar.

Dari narasi di atas, manfaat PBK yang dilakukan BBJ seharusnya masuk prioritas utama dalam agenda pembangunan ekonomi. Lalu mengapa tak terjadi? Oleh karena masih ada hambatan di sisi birokrasi serta belum terbentuknya koordinasi sinergis antara beberapa Kementerian terkait (Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN). Potensi PBK sangat besar dan pasar (global/domestik) kini sangat dinamis. Jika regulator kurang bisa mengimbangi dinamika ini, maka potensi pasar pasti sulit *revealed*.

Kembali ke narasi di atas, seandainya sang petani mengetahui informasi harga referensi formal yang bukan hasil rekayasa ijon, maka kegiatan produksi kopi yang berdampak langsung ke biaya tentu bisa disesuaikan oleh sang petani sejak dini mengacu ke harga BBJ, bahkan jauh sebelum hari penyerahan terjadi. Ini baru satu contoh. Begitu banyak komoditi di Nusantara.

Realisasi potensi PBK yang optimal pasti membuat petani domestik terbantu, industri pun terkelola dengan baik (*good corporate governance*) dan perekonomian lebih cepat bertumbuh.☺\*) *Chief Research Officer, PT Rifan Financindo Berjangka*



Teddy Prasetya

## 'Turun Gunung' Benahi PBK

*Kegelisahan batinnya melahirkan idealisme yang nyata dan penuh makna. Teddy ingin industri perdagangan berjangka komoditi- PBK menjadi lebih besar, sehingga kue dan persentase keuntungannya pun bisa ikut menjadi besar.*

Meski terkesan baru terlihat di panggung industri perdagangan berjangka komoditi, Teddy Prasetya bukanlah orang baru di kalangan pelaku perusahaan pialang. Dia telah terjun sejak awal industri PBK baru mulai merangkak jalan. Saat itu, dia bergabung di Rifan Financindo Group pada tahun 2000 silam. Bahkan pada tahun 2003, dia pernah diberi kepercayaan untuk duduk di salah satu kursi direksi.

"Saya salah satu pihak yang mendorong perusahaan pialang untuk masuk ke bursa berjangka," ucap Teddy, begitu ia biasa disapa.

Tapi pada tahun 2005, dia menghilang dari baris depan panggung perusahaan pialang. Dia mengaku berada di balik layar perusahaan pialang yang ada di

Rifan Financindo Group. "Saya merasa lebih nyaman mengurus sisi bisnisnya di belakang layar," beber pria yang mengaku memiliki saham di Rifan Financindo Group itu.

Setelah menghilang selama bertahun-tahun, barulah pada September 2015, Teddy muncul kembali sebagai Direktur Utama PT Rifan Financindo Berjangka (RFB). "Waktu dipomosikan menjadi Dirut RFB, ada seorang teman yang bilang: saya bukan dipromosikan, tapi turun gunung," ujarnya sambil tersenyum.

Anggapan jika Teddy "turun gunung", sepertinya tidak salah. Setelah lama menghabiskan waktunya di balik layar, kini Teddy muncul membawa gagasan dan semangat baru untuk membangun industri PBK. Dia ingin semua pelaku di industri ini bergandengan tangan

bersama-sama membangun industri PBK menjadi lebih maju dan besar. "Itu visi saya," ungkapnya.

Selama ini, dia melihat, pencapaian transaksi kontrak komoditi multilateral belum sesuai dengan amanat UU PBK untuk menjadikan perdagangan berjangka sebagai sarana lindung nilai-*hedging* dan pembentukan harga-*price discovery*. "Transaksi multilateral belum berkualitas, meskipun ada kewajiban pialang melaksanakan sebesar 5 %, " tuturnya.

Padahal, dari kacamata pria kelahiran Bangka, tahun 1974 ini, produk multilateral bisa mendatangkan keuntungan yang besar jika mau digarap dengan serius. "Kalau sudah profit, perusahaan akan berekspansi dan akan menciptakan lapangan kerja," katanya. Hanya saja,



industri PBK tidak bisa didorong maju hanya oleh satu atau dua perusahaan. "Tentunya harus bersama-sama," tegas Teddy.

Hal itu memanglah tidak mudah. Untuk menggenjot transaksi produk multilateral butuh proses. Berbeda jika hanya untuk menaikkan nilai transaksi Sistem Perdagangan Alternatif- SPA atau transaksi bilateral. Tidak begitu rumit dan tidak melalui proses panjang. "Tapi pelaku PBK jangan hanya mengejar keuntungan jangka pendek saja, hendaknya dipikirkan juga untuk jangka panjangnya," ucapnya.

Karena itu, peran Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia- Aspebtindo untuk menyatukan persepsi dan melakukan konsolidasi sangat penting. Salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan pertemuan rutin semua direksi perusahaan pialang dan pedagang berjangka setidaknya sekali dalam sebulan.

Tapi sayangnya, Teddy bilang, banyak direksi yang bertugas di perusahaan pialang sifatnya hanya *de jure* saja, bukan *de facto*. "Sebab itu jika perlu kita undang juga yang *de facto*-nya. Kita kumpul dan ngobrol menyatukan persepsi untuk sama-sama membangun industri PBK."

Tak kalah penting, dia juga mengingatkan agar sesama pelaku industri PBK tidak saling sikut-menyikut untuk meraih keuntungan. Satu contoh, jika ada suatu kasus di sebuah perusahaan pialang, maka perusahaan pialang lain justru jangan merasa senang.

Mengapa? Karena masalah itu pada akhirnya bukan hanya berimbas kepada perusahaan pialang yang memiliki kasus itu saja. Justru industri PBK 'lah yang terkena imbas buruknya. "Semua kena. Karena bagaimana mungkin kita bisa meyakinkan masyarakat untuk berinvestasi, jika industri ini sudah tercoreng," ujar Teddy.

"Yang justru harus diberantas yaitu perusahaan investasi bodong. Ini yang berbahaya," tambahnya. Dia juga meyakini jika industri PBK dapat maju dan besar, maka para pelakunya akan



mendapat keuntungan yang besar. "Jika industri PBK ini besar, 'kuenya' pun akan besar. Sehingga pembagian 'kuenya' juga ikut besar."

## Sosialisasi dan Edukasi

Menurut Teddy Prasetya, untuk membenahi industri PBK semua pelaku mulai dari pialang, pedagang, bursa berjangka, lembaga kliring dan pihak *stakeholder* lainnya harus bersinergi. "Ayo kita sama-sama membangunnya. Saya yakin jika sinergitas terjalin dengan baik, dalam waktu 3 atau 5 tahun industri ini akan jauh lebih besar dari sekarang," ucapnya.


Selain itu, dia berharap, Presiden RI Joko Widodo dapat memberikan atensi dan dukungannya dalam pengembangan industri PBK di Indonesia. "Kalau Pak Jokowi mengetahui tentang fungsi dan peran PBK, saya yakin pasti beliau akan ikut membantu. Sebab, *underline*- subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan bursa berjangka menyangkut berbagai sektor yang saat ini menjadi fokus kebijakan pemerintah. Seperti sektor riil, tanaman pangan, perkebunan, pertambangan, kelautan dan lainnya. Jadi tinggal bagaimana kita punya akses untuk menembus ke lingkaran istana," ucap Teddy.

Faktor penting lainnya di industri PBK ini adalah sosialisasi dan edukasi. Hal itu untuk mengubah citra negatif industri

PBK di mata masyarakat. Tapi sayangnya hal itu belum dilakukan maksimal oleh para pelaku PBK. Tak heran, jika risiko investasi PBK yang bersifat *high risk high return* tidak banyak dipahami nasabah. Imbasnya, industri PBK dipandang negatif lantaran ada nasabah yang merugi.

Padahal, Teddy membandingkan, nasabah yang melakukan transaksi di bursa saham tak jarang mengalami kerugian. Apalagi untuk tahun ini. Kerugian di pasar saham jauh lebih besar. Lantas, kenapa nasabah tidak rebut dan tidak komplain? Bahkan berita pasar saham tetap positif?

"Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan bursa saham sudah membentuk *branding* yang positif bagi industrinya. Mereka semua bergotong royong untuk melakukan edukasi yang positif. Ini yang harus dilakukan oleh bursa berjangka dan otoritas," jawab Teddy.

Catatan penting lainnya, Teddy menekankan, sosialisasi dan edukasi yang optimal dibutuhkan untuk menggenjot transaksi multilateral. "Perusahaan pialang tentu tidak bisa melakukannya sendiri, semua pihak terkait harus ikut mendukung. Kalau hal itu bisa kita lakukan, industri PBK akan menjadi salah satu tolak ukur atau barometer perekonomian nasional," tandas Teddy Prasetya. 

# BIJAK BERINVESTASI



**Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi - Bappebti**  
**[www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)**